



## **Persepsi Masyarakat Transmigran Jawa di Daerah Paguyaman Provinsi Gorontalo Terhadap Kebijakan Transmigrasi Pada Masa Pemerintahan Soeharto**

### ***Perceptions of Javanese Transmigrant Communities in Paguyaman District, Gorontalo Province Against Transmigration Policy During the Soeharto Administration***

Renol Hasan<sup>1)</sup>, Sutrisno Mohamad<sup>1)</sup>, Andris K. Malae<sup>1)</sup>, Fikriyanto R. Latif<sup>1\*)</sup>

<sup>1)</sup>Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

<sup>\*)</sup>Corresponding Author: [fikriyanto01latif@gmail.com](mailto:fikriyanto01latif@gmail.com)

#### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the perceptions of the Javanese people in the Paguyaman Region of Gorontalo Province towards the transmigration policy during the Soeharto era. The research method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection was carried out using interview techniques and field observations. The results of the research show that the people were disappointed with several things regarding the transmigration program, especially regarding the government's promises at that time, which were not fully realized. There were several problems at the destination location that contributed to the transmigrant community's dissatisfaction with the program, including the government's promise that the location where the transmigrants would live was ready to be occupied and agricultural land was also ready to be worked on, but in reality, the location of the placement transmigrants is still the wilderness, and the promised agricultural land still had to be cleared of weeds. The transmigrant community felt that what the government had promised during socialization was still far from the community's expectations when they saw the placement locations first hand.*

*Keywords: New Order Government Policy, Transmigration, Javanese Society, Paguyaman*

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Jawa di Kawasan Paguyaman Provinsi Gorontalo terhadap kebijakan transmigrasi pada masa pemerintahan Soeharto. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat kecewa dengan beberapa hal terkait program transmigrasi, terutama terkait janji pemerintah saat itu yang tidak sepenuhnya terealisasi. Ada beberapa masalah di lokasi tujuan yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat transmigran terhadap program tersebut, antara lain janji pemerintah bahwa lokasi tempat tinggal para transmigran siap ditempati dan lahan pertanian juga siap digarap, namun kenyataannya, lokasi penempatan transmigran masih hutan, bahkan dan lahan pertanian yang dijanjikan pun masih harus dibersihkan dari semak belukar. Masyarakat transmigran merasa apa yang dijanjikan pemerintah saat sosialisasi masih jauh dari harapan masyarakat ketika mereka melihat langsung lokasi penempatan.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pemerintah Orde Baru, Transmigrasi, Masyarakat Jawa, Paguyaman

## PENDAHULUAN

Transmigrasi merupakan sebuah program yang memang sudah dibuat oleh pemerintah Negara Indonesia sebelumnya. Diketahui bersama bahwa program ini dibuat untuk memindahkan penduduk yang berada dalam wilayah padat penduduk menuju daerah atau wilayah yang masih kurang penduduknya, atau bahkan wilayah yang memang belum berpenghuni, dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mendukung keberhasilan kebijakan program yang telah di buat oleh pemerintah Indonesia, yakni program transmigrasi, dibutuhkan implementasi kebijakan publik yang sanggup untuk mengurus program pemerintah dalam lebih baik, dimana mengimplementasikan kebijakan publik adalah langkah krusial pada proses kebijakan publik. Karena sebuah program atau kebijakan publik ini harus diimplementasikan supaya punya dampak atau tujuan yang dibutuhkan dan diinginkan secara bersama (Ilna, 2022).

Program pemindahan penduduk ini atau yang disebut dengan transmigrasi, pertama kali diterapkan di Indonesia atas gagasan atau buah pikiran dari orang-orang Belanda, pada awal abad XX, lebih tepatnya pada tahun 1905. Belanda sendiri menerapkan program transmigrasi ini dengan sebutan *kolonisatieproof* atau kolonisasi (Ayu, 2021). Pelaksanaan program "kolonisasi" tersebut, dimulai pertama kali pada bulan November tahun 1905, tercatat ada sejumlah 155 KK (815 jiwa) yang diberangkatkan ke daerah Gedong Tataan, dilihat dari jaraknya kurang lebih 25 kilometer dari sebelah barat Tanjung Karang di sisi jalan menuju Kota Agung (pada waktu itu masih termasuk daerah keresidenan Lampung). Dari jumlah jiwa yang disebutkan di atas penduduk yang dipindahkan tersebut berasal dari beberapa daerah di Indonesia yaitu dari daerah Kebumen, Kabupaten Karanganyar dan Purwarejo (waktu itu termasuk daerah Karesidenan Kedu, Jawa Tengah). Para transmigrasi waktu itu di tempatkan di salah satu desa yang berada di Kabupaten Purwarejo, Jawa Tengah nama dari desa tersebut adalah Bagelen, yang menjadi lokasi bagi penempatan para transmigransi. Dipilihnya nama Desa Bagelen tersebut agar penduduk yang dipindahkan ke wilayah itu dapat merasa nyaman dan betah saat berada di tempat tinggal barunya, sehingga dari pemberian nama desa ini para penduduk bisa merasakan bahwa mereka masih berada di wilayah tempat tinggal mereka sebelumnya. Pada tahun-tahun selanjutnya, program kolonisasi oleh Belanda ini diterapkan di daerah Sulawesi Tengah dan daerah Bengkulu sampai pada akhir tahun 1930-an (Yudohusodo, 1998). Program kolonisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Hindia Belanda selama masih berada di Indonesia, bisa dikatakan panjang sekitar 36 tahun yang dimulai dari tahun (1905-1941) yang dalam pemindahan penduduknya mencapai sebanyak 189.938 orang. Selanjutnya, sesudah kemerdekaan, dikirim sejumlah 600.518 penduduk yang ditransmigrasikan dalam kurun waktu 25 tahun itu dimulai dari tahun (1950-1974). Namun perbedaannya, program yang dilaksanakan oleh Belanda hanya lebih terfokus di Pulau Jawa (Suparmi, 2020).

Seiring berkembangnya zaman, Pemerintah Republik Indonesia mengubah istilah *kolonisatieproof* atau kolonisasi di tahun 1950 dengan istilah transmigrasi (Prihatin, 2013). Transmigrasi yang dilakukan pada masa pemerintahan kolonial Belanda lebih terfokus di wilayah pulau Jawa dengan tujuan penduduk yang dipindahkan dijadikan buruh perkebunan. Hal ini memiliki perbedaan dengan transmigrasi oleh pemerintahan Indonesia, transmigrasi yang dilakukan oleh indonesia dalam upaya pemenuhan pekerja dalam pembangunan berbagai macam proyek di wilayah yang kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), (Ayu, 2021).

Berdasarkan (Undang-undang No. 15 Tahun 1997), mengenai kebijakan transmigrasi, dijelaskan bahwa, pengembangan penduduk yang ditransmigrasikan serta kawasan wilayah transmigrasi ditujukan dalam mencapai kesejahteraan, kemandirian, dan integrasi transmigrasi dengan masyarakat sekitar, bukan hanya itu, hal ini juga merujuk pada pelestarian fungsi lingkungan secara berlanjut.

Pada masa Orde Baru kepadatan penduduk yang ada di Indonesia waktu masih terfokus pada wilayah Pulau Jawa dan Bali. Sementara itu, wilayah-wilayah seperti Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi masih jarang penduduknya atau bahkan belum berpenghuni. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia merancang atau membuatkan suatu kebijakan pemerintah guna untuk mengatasi ketidakmerataan penduduk yang ada di beberapa wilayah Indonesia (Hafid, 2016). Dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional, maka pemerintah pada masa Orde Baru menggunakan kebijakan transmigrasi, ini adalah prioritas utama untuk pembangunan nasional dasar, sehingga selanjutnya akan

diadaptasikan dengan pola umum pembangunan jangka panjang. Terkait dengan program transmigrasi ini, Presiden Soeharto pernah menjelaskan, bahwa kebijakan program transmigrasi adalah suatu kebijakan pemindahan penduduk yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Selain itu perhatian pada program ini juga cukup besar, pada zaman kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintah pernah mengajukan target dalam memindahkan 2 juta penduduk dalam kurun waktu setahun, maka dari itu sangat diperlukan sensitivitas dan kepekaan dengan bermacam strategi serta cara dalam menjalankan program transmigrasi oleh pemerintah tersebut. Dapat kita ketahui bersama, bahwa program Transmigrasi Pemerintah Indonesia merupakan suatu pesan yang harus diceritakan dan diketahui oleh orang banyak, khususnya masyarakat yang akan menjadi calon transmigran. Pemerintah zaman Soeharto mempunyai target supaya pesan yang disampaikan tepat pada sasaran sebelumnya dan penduduk bersedia atau mau untuk dipindahkan melalui program transmigrasi tersebut. Pesan program transmigrasi tersebut berupa ekspresi atau ucapan (simbol yang dicatat, direkam, diorganisasi dan ditransmisikan). Pesan ini mempunyai arti dan bisa ditafsirkan menjadi sumber informasi dan memiliki makna bagi para penerimanya. Informasi transmigrasi secara signifikan harus dapat memengaruhi para penerima informasi yang dalam definisinya sebagai informasi transmigrasi (Putra, 2019).

Berpindah dari wilayah-wilayah yang sudah dijelaskan sebelumnya, Pulau Sulawesi mempunyai keberagaman etnis yang tersebar namun masih relatif berbeda. Jika etnis Jawa adalah etnis yang paling identik dengan penduduk paling banyak di Indonesia, maka berdasarkan lima daerah provinsi ini, etnis Jawa hanya muncul di dua provinsi, yakni Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo (Pitoyo, 2017).

Transmigrasi di Gorontalo sendiri dimulai sejak tahun 1950 sampai dengan pemerintahannya presiden soeharto, transmigrasi Jawa di Gorontalo bertempat di wilayah Paguyaman, kondisi ini sangat menarik, mengingat bahwa kondisi geografis Provinsi Gorontalo masih bisa dikatakan berbeda jauh dari wilayah Pulau Jawa. Sementara sarana transportasi kala itu, masih relatif terbatas, sehingga saat itu Gorontalo berbeda dengan Pulau Kalimantan dan Sumatera yang memang sangat mudah untuk dijangkau bagi para penduduk yang akan ditransmigrasikan. Berdasarkan pada kenyataan itu, sangat menarik jika menyelidiki lebih lanjut tentang pelaksanaan program tersebut di Provinsi Gorontalo khususnya di wilayah Paguyaman (Manay, 2016).

Daerah Gorontalo yang menjadi awal tujuan dari kebijakan transmigrasi adalah wilayah Paguyaman. Paguyaman merupakan suatu wilayah yang sangat luas, sekitar 65 km dari sebelah barat Kota Gorontalo. Wilayah ini menjadi pilihan karena selain tersediannya banyak lahan, kondisi topografi tidak terlalu berbeda dengan wilayah yang berada di pulau Jawa sana. Dataran dengan ketersediaan air yang cukup, dan cocok untuk lahan persawahan bagi para transmigran menjadikan wilayah Paguyaman sebagai wilayah yang tepat untuk dijadikan tempat bagi penduduk transmigran dari Jawa karena sangat ideal untuk percobaan program awal Transmigrasi Jawa di Gorontalo (Manay, 2016).

## **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo pada hari jumat tanggal 18 November 2022. Kajian dari penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Pada penelitian untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat transmigrasi Jawa yang ada di Paguyaman, maka digunakan metode kualitatif dimana metode kualitatif merupakan bentuk penelitian yang diarahkan untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat Jawa terhadap kebijakan transmigrasi Soeharto di Paguyaman, baik itu kondisi sosial, program transmigrasi, persepsi masyarakat, dan proses adaptasi masyarakat transmigran dengan masyarakat lokal.

Pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan teknik wawancara pada beberapa informan. Menurut Arikunto (Fadhallah, 2021) bahwa teknik observasi merupakan teknik pengumpulan keterangan atau data yang memang harus dijalankan melalui usaha-usaha dalam pengamatan secara langsung ke wilayah atau tempat yang menjadi objek penelitian. Denzin mendefinisikan bahwa wawancara merupakan percakapan yang di lakukan secara *face to face* (tatap muka), dimana pihak yang mengadakan wawancara menggali informasi atau data dari orang yang menjadi sumber penelitiannya. Sedangkan menurut Black dan Champion (Fadhallah, 2021) bahwa wawancara yaitu suatu komunikasi verbal yang tujuannya untuk mendapatkan informasi dari salah satu pihak.

Sementara itu di lain sisi, wawancara menurut True (Fadhallah, 2021) mendefinisikan bahwa wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang membahas suatu objek yang spesifik. Suatu pelaksanaan komunikasi interaksional yang tujuannya sudah ditetapkan dalam mendalami tema tertentu melalui pertanyaan-pertanyaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Sosial Masyarakat Paguyaman

Paguyaman merupakan wilayah sungai strategis nasional yang ada di Provinsi Gorontalo, memiliki luas 3.485,65 km<sup>2</sup> dengan sungai utamanya yaitu sungai Paguyaman panjang 136 km. Secara geografis WS Paguyaman terletak pada 00<sup>o</sup>29' LU sampai 00<sup>o</sup>55' LU dan 121<sup>o</sup>55' BT sampai 122<sup>o</sup>44' BT, dengan batas-batas administrative Sebelah Timur; Kecamatan Pulubala dan Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo; Sebelah Selatan : Teluk Tomini, Sebelah Barat; Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato; Sebelah Utara : Kabupaten Gorontalo Utara.

Paguyaman adalah salah satu wilayah yang terletak di wilayah Provinsi Gorontalo, Kabupaten Boalemo dengan kondisi masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, dilihat dari luas lahan pertanian yang mencapai sekitar 21.663 Ha, dimana lahan yang dimanfaatkan kurang lebih 7.460 Ha (Bantulu, 2019). Secara umum masyarakat Paguyaman merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beberapa etnis yaitu, etnis Jawa, etnis Bali, etnis Minahasa, dan Gorontalo selaku etnis mayoritas asli Paguyaman namun tetap memperhatikan kearifan lokalnya.

Budaya masa lampau dalam produknya menjadi sumber kearifan lokal yang menjadi pedoman hidup bagi para pengikutnya. Namun daripada itu, meski bernilai lokal, akan tetapi nilai-nilai terpendam di dalamnya dibenarkan bahwa sangat universal. Kearifan lokal selalu dijadikan warisan bagi para generasi selanjutnya baik secara tertulis maupun secara lisan, dan diajarkan secara turun temurun sehingga kearifan lokal tetap terjaga meskipun berbeda zaman. Penduduk yang ada di daerah Paguyaman hingga saat ini, terus menjaga dan melestarikan warisan para leluhur mereka. Contohnya, dalam segi penggunaan bahasa oleh masyarakat Paguyaman yang sehari-harinya masih kental dengan penggunaan bahasa leluhurnya yaitu bahasa Gorontalo. Sementara di lain sisi, dari kearifan lokal di daerah Paguyaman yang masih tetap terjaga dan dilestarikan yaitu "*Mohuyula*" yang memiliki arti nilai gotong royong antar masyarakat secara bersama-sama. Nilai gotong royong "*Mohuyula*" ini dapat kita lihat pada kegiatan masyarakat Paguyaman yang tercermin dalam aktivitas pembangunan fasilitas umum yakni seperti pembangunan rumah ibadah, pembangunan jalan, dan renovasi rumah bagi warga miskin. Selain itu, dalam nilai kebersamaan masyarakat Paguyaman, dapat dilihat pada warganya yang saling membantu jika ada kekurangan. Penarikan dana sosial banyak terlaksana oleh para pemerintah desa terlebih bagi seorang yang ditunjuk oleh masyarakat sebagai kepala desa, yang dalam tujuannya untuk menolong bagi warganya yang sedang terkena musibah dan penyakit. Dengan terus berjalannya nilai-nilai dari kearifan lokal ini, berarti masyarakat Paguyaman sadar bahwa kebersamaan dan gotong royong yang terjadi adalah hakikat kehidupan manusia yang memiliki rasa sosial yang tinggi, yang dimana memang pada dasarnya manusia membutuhkan satu sama lain, dan mereka juga paham bahwa sesuatu kekurangan akan bisa teratasi jika bersama-sama (Resnawaty, 2017).

Hadirnya penduduk transmigran dari Pulau Jawa di Paguyaman, tentu memiliki kerarifan lokalnya sendiri, meskipun sudah berada dalam wilayah yang memang bukan tempat tinggal mereka sebelumnya. Namun, para penduduk transmigran ini dapat saling berbaur dengan masyarakat lokal, sehingga etnis Jawa dan etnis lokal dapat saling menghargai antar kebudayaan yang mereka punya masing-masing. Hal ini dapat kita lihat pada masyarakat Paguyaman sekarang, dimana etnis Jawa sudah bisa berbahasa Gorontalo begitu pun sebaliknya. Bukan hanya bahasa, adat dan tradisi lainnya pun berbeda seperti pada adat pernikahan, jika masyarakat Jawa mengadakan acara, maka penduduk lokal biasanya berbaur untuk saling membantu dalam menyukseskan acara yang diadakan oleh masyarakat Jawa. Pada konteks ini, dapat dilihat secara seksama bahwa masuknya para transmigran dari Pulau Jawa ke wilayah Paguyaman tidak mempengaruhi perubahan kearifan lokal etnik Gorontalo dan begitupun sebaliknya.

Upaya untuk merubah kondisi sosial masyarakat lokal menjadi sejahtera dan lebih baik, maka program transmigrasi adalah suatu program yang bisa dikatakan sukses, dalam bentuk intervensi pada pelaksanaan pembinaan serta pelatihan. Wujud dari intervensi yang dilaksanakan masyarakat

pendatang terhadap masyarakat lokal di tempat transmigrasi yaitu dengan cara menyalurkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan nilai-nilai kebaikan (*value*), sehingga dalam penerepan model intervensi sosial pada pengembangan masyarakat lokal di daerah transmigrasi di Paguyaman, terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi, karena pada dasarnya masyarakat Jawa sudah terlebih dahulu mendapatkan ilmu dalam bidang tersebut. Salah satu contohnya, seperti penggarapan tanah yang dijadikan lahan pertanian sawah, yang dahulu belum diketahui oleh masyarakat lokal, kini sudah diketahui karena adanya transfer *knowledge* dari masyarakat transmigran yang ditempatkan di wilayah Paguyaman.

### **Program Transmigrasi Pemerintah Indonesia**

Awal dikenalnya program perpindahan penduduk atau yang lebih kita kenal dengan sebutan transmigrasi ini, sudah ada sejak zaman pemerintahan Belanda di Indonesia dengan istilah kolonisasi (Yuminarti, 2017). Sehabis masa pemerintahan Belanda di Indonesia, Jepang melanjutkan Program kolonisasi yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan diganti namanya menjadi transmigrasi. Bahkan, pada masa Orde Baru, sempat dibentuknya lembaga yang mengelola program dari pemindahan penduduk ini, lembaga tersebut dikenal sebagai Departemen Ketenagakerjaan dan transmigrasi (Dahlan, 2014).

Tahun 1905 adalah tahun pertama program kolonisasi ini dilaksanakan. Selanjutnya, sesudah masa kemerdekaan, program ini masih terus berlanjut namun penggunaan nama programnya yang diganti menjadi transmigrasi. Menurut Swasono (Yuminarti, 2017), selama kurun waktu 80 tahun pelaksanaan program kolonisasi atau transmigrasi ini, memakan jumlah sebanyak 3,65 juta jiwa yang keluar dari Pulau Jawa, sementara itu pertambahan angka jumlah penduduk di Pulau Jawa bertambah sebanyak 2 juta jiwa dalam setiap tahunnya. Hal ini yang menyebabkan pemerintah Indonesia kala itu sulit dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup warga transmigran. Hal tersebut dipicu karena terlaksananya kebijakan mengenai perpindahan penduduk ini tidak disertai dengan pengendalian angka jumlah penduduk.

Perubahan orientasi dan bertambahnya angka jumlah penduduk yang meningkat dalam setiap tahun, mengakibatkan munculnya suatu permasalahan terkait kurang atau terbatasnya lahan dan meningkatnya angka kemiskinan. Transmigrasi suatu usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi tekanan jumlah penduduk dari suatu daerah yang padat penduduknya. Mengingat bahwa program transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah sangat bermanfaat dalam mengatasi permasalahan terkait kepadatan penduduk dan dalam peningkatan kesejahteraan di Indonesia, oleh karena itu, seharusnya kebijakan ini dipertahankan dan dikembangkan lagi. Suksesnya program transmigrasi dimasa lalu dapat menjadi cerminan dalam mengembangkan program ini di masa mendatang, dengan melihat bahwa kepadatan penduduk akan tetap bertambah dari tahun ke tahun. Pada konteks lain, program ini juga mengalami kegagalan, sehingga menimbulkan banyak kritik. Salah satu kritik yang muncul yakni, bahwa program transmigrasi tidak lebih cuma sekedar memindahkan kemiskinan penduduk saja, dan bukan menjadikan penduduk yang ikut dalam program transmigrasi menjadi sejahtera. Maka dari itu, nampaknya perlu adanya perubahan terkait dengan peningkatan kebijakan program pemerintah tersebut.

Perubahan orientasi dalam peningkatan kebijakan program transmigrasi tersebut yakni melalui peningkatan pembangunan daerah yang khususnya wilayah-wilayah diluar dari pulau Jawa dan Bali dalam kepentingan pembangunan nasional (Legiani, et. al, 2018). Mayoritas dari masyarakat yang menjadi penduduk transmigran adalah orang-orang Jawa, hal ini memang sangat logis jika “Jawanisasi” adalah bagian yang memang tidak dapat terpisahkan dari program transmigrasi tersebut, karena hal itu merupakan titik balik pada sejarah kebijakan transmigrasi pemerintah Negara Indonesia saat arus balik transmigrasi terlihat jelas selama lima tahu terakhir. Setelah krisis ekonomi dan masa pemerintahan presiden Soeharto telah selesai, konflik-konflik sosial terjadi diluar pulau Jawa.

Sejalan dengan uraian di atas, studi Bumulo, S, Adiwibowo, S, dan Sjaf, (2017) menjelaskan bahwa warga transmigran seringkali menggunakan kebijakan pemerintah Orde Baru sebagai legitimasi dalam mendapatkan tanah di daerah tujuan. Legitimasi ini yang menjadi kekuatan warga transmigran dimana mereka berada di lokasi tujuan tidak atas kehendak sendiri, namun melalui program yang telah dilaksanakan pemerintahan Orde Baru. Kondisi ini dapat dilihat dari proses “Jawanisasi” daerah-

daerah yang berada di luar pulau Jawa, yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru saat itu melalui “modus operandi” yang diberi nama transmigrasi. Meski pun proses distribusi kekuatan identitas tersebut tidak secara langsung dilakukan, namun proses “Jawanisasi” di berbagai daerah sangat jelas terlihat melalui polemik-polemik yang ditimbulkan oleh program ini, salah satunya konflik sosial.

Tahun 1971, merupakan awal Repelita I (Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama) Orde Baru, diadakannya suatu lokakarya internasional menyangkut tentang transmigrasi dengan para peserta yakni para ahli asing. Pada jangka waktu satu tahun setelahnya presiden menandatangani sebuah undang-undang tentang program transmigrasi. Menurut undang-undang tersebut, Program transmigrasi di Indonesia memiliki 7 tujuan: 1) pembangunan daerah; 2) penggunaan sumber daya alam dan manusia; 3) perbaikan tingkat kesejahteraan; 4) pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia; 5) memperkuat pertahanan dan keamanan nasional; 6) persatuan dan kesatuan nasional; 7) distribusi penduduk yang seimbang (Sudarmo, 2017)

Wilayah Gorontalo yang menjadi maksud rencana awal kebijakan dari program transmigrasi ini adalah wilayah Paguyaman. Penduduk yang telah melakukan perpindahan ke wilayah Provinsi Gorontalo sudah memenuhi proses seleksi dan memperoleh berbagai kompetensi tambahan melalui *in house* dan *in house training*. Namun, pelatihan saja tidak cukup, sehingga tentu diperlukannya *softskill* yang ada dan dimiliki oleh pribadi sendiri, karena tempatnya akan disesuaikan dengan tupoksinya masing-masing (Habi, et. al, 2022)

### **Persepsi Masyarakat Terhadap Sumber Daya Alam**

Berbagai macam persepsi masyarakat terkait dengan pengelolaan sumber daya alam daerah yang memusatkan pada usaha peningkatan sosial ekonomi tetapi bertolak belakang dengan harapan dari masyarakat yang mengikuti program transmigrasi. Kondisi ini perlu diketahui supaya penggarapan potensi kawasan bisa terarah kepada sistem kolaborasi yang dapat diprogramkan oleh berbagai pihak yakni masyarakat, pengelola kawasan, dan juga pemerintah daerah (Nurrani, 2013). Pemanfaatan sumber daya alam adalah faktor yang sangat membantu bagi masyarakat transmigrasi Jawa yang ada di Paguyaman, sebab hal yang sudah dijanjikan sebelumnya, justru tidak memadai untuk keberlangsungan hidup para transmigran. Lahan yang diterima sebagaimana janji pemerintah dahulu, justru masih lahan kosong berupa hutan belantara, sehingga keadaan sosial masyarakat transmigran pada waktu itu masih memanfaatkan hasil alam untuk bertahan hidup, terdapat beberapa pengelolaan sumber daya alam yaitu pembukaan lahan yang dijadikan sebagai lahan pertanian, seperti lahan sawah, jagung dan umbi-umbian. Akan tetapi, dari hasil alam yang mereka kelola tersebut dulunya tidak dijual melainkan apa yang sudah dihasilkan mereka simpan untuk kebutuhan pokok mereka sehari-hari.

Seiring berjalannya waktu, perekonomian beberapa masyarakat transmigran di Paguyaman sudah tidak bergantung pada alam, hal ini disebabkan adanya kemajuan perekonomian pada masyarakat transmigrasi Jawa yang ada di Paguyaman dengan ditandai dengan beberapa masyarakat yang telah memiliki usaha seperti toko, pengelolaan UMKM, dan bahkan ada beberapa yang menjadi pegawai negeri. Namun, sebagian lainnya masyarakat transmigrasi masih bekerja sebagai petani di lahan pertanian mereka sendiri demi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pribadi ataupun kelompok. Penghasilan dari masyarakat transmigran tidak hanya terfokus dalam satu pekerjaan saja namun ada pekerjaan lainnya yang menjadi sumber penghasilan mereka (Santoso dan Nasir, 2022). Berdasarkan dari hasil temuan lapangan, bahwa masyarakat transmigrasi di Paguyaman sedikit lebih maju dibandingkan dengan masyarakat lokal, hal ini dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat transmigrasi yang telah meningkat.

Peningkatan perekonomian masyarakat transmigrasi di lokasi tujuan tidak hanya terjadi di Paguyaman saja, namun juga kondisi ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya masyarakat transmigrasi yang ada di Provinsi Kalimantan Timur (Prihatin, 2013). Peningkatan yang sama juga terjadi di Kutai Timur, dengan berbagai peningkatan pendapatan yang mempengaruhi perekonomian masyarakat transmigrasi memicu lahirnya perkembangan aset-aset yang dimiliki masyarakat transmigran baik itu dari pembangunan rumah aset bergerak mobilitas dari sektor transportasi (Santoso dan Nasir, 2022).

## Persepsi Masyarakat Jawa Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Program Transmigrasi

Motif terjadinya transmigrasi yang terjadi di Indonesia karena memang ada beberapa masalah dan alasannya. Alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh para transmigran mengenai perpindahan mereka. Seperti motif kemakmuran, motif kesejahteraan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Motif-motif ini adalah janji dari pemerintah kala itu, namun justru tidak sesuai dengan harapan bagi para masyarakat transmigran. Hal ini juga dapat dilihat dari program kolonisasi yang sebelumnya dilakukan oleh Belanda dimana mereka hanya memanfaatkan program ini agar supaya para transmigran dimanfaatkan tenaga kerjanya dilahan perkebunan.

Sejalan dengan hal di atas, ada beberapa etnis yang ada di Indonesia memiliki kecenderungan bepergian meninggalkan kampung halaman, karena ada pengaruh dari faktor demografi seperti padatnya penduduk yang ada di Pulau Jawa membuat kebijaksanaan pemerintah kolonial memindahkan sebagian orang Jawa menjadi pekerja kontrak di berbagai perkebunan (Soemardjan, 1998).

Berdasarkan motif di atas, hal yang sama juga disampaikan oleh Fawcet (Abadi, Et al., 2016) bahwa *pertama* motif kemakmuran (mendapatkan lahan seluar 2 hektar, rumah transmigran tipe 36, jaminan hidup baik beras maupun non-beras dan bantuan-bantuan gratis lainnya yang akan diberikan oleh pemerintah); *kedua* motif kemandirian (memperoleh modal usaha, kesempatan kerja, ekonomi, pembinaan dalam bidang pertanian dan budaya di lokasi transmigrasi); *ketiga* motif kenyamanan (mendapatkan kehidupan yang lebih ketika pindah melalui program transmigrasi); dan *keempat* motif afiliasi (mempererat persaudaraan dan tali silaturahmi antar masyarakat transmigran pendatang serta menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan melalui transmigrasi).

Motif yang disampaikan oleh Fawcet ini sama dengan yang terjadi pada masyarakat transmigran Jawa yang ada di Paguyaman, namun dari beberapa kesamaan tersebut, janji yang diterima justru bertolak belakang dengan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah sebelumnya, berdasarkan motif yang disampaikan di atas maka hal ini justru menuai masalah-masalah pada masyarakat transmigran di Paguyaman yang menyebabkan beberapa kesenjangan sosial, terutama melahirkan protes masyarakat pada pemerintah yang tidak amanah dalam merealisasikan janjinya dulu, sehingga munculah beberapa persepsi dari masyarakat transmigran mengenai kebijakan yang dibuat pemerintah agar menjadi solusi pemerataan penduduk yang ada di pulau Jawa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang bernama Syahril Asi tanggal 6 Januari 2023 pukul 09.00, diketahui bahwa transmigrasi di Jawa dibagi atas beberapa rombongan, hal ini dibuat agar masyarakat transmigran dapat diatur dengan baik oleh pemerintah, namun yang terjadi di beberapa tempat di Paguyaman, masyarakat transmigrasi ini ada yang tidak betah dan memilih untuk pulang karena ada kesenjangan sosial yang terjadi, seperti ketidaknyaman dan tidak terbiasa hidup dalam pemukiman yang baru sehingga ada beberapa kepala keluarga yang memilih pulang walaupun sarana yang disiapkan oleh pemerintah sudah diberikan, dan apa yang sudah mereka dapatkan di lokasi tujuan berupa tanah sawah dan rumah mereka jual untul biaya mereka kembali kepulau Jawa. Masyarakat yang pulang kebanyakan dari wilayah DKI Jakarta, namun hal ini berbeda lagi dengan masyarakat Jawa Timur yang memilih untuk bertahan karena sudah betah dan nyaman berada di wilayah Paguyaman, karena masyarakat yang ada di Paguyaman hidup rukun dan saling membantu sehingga saling memenuhi dan saling bergantung.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan informan tanggal 6 Januari 2023 pukul 14.30, diketahui bahwa Warni Sakur selaku orang yang mengalami langsung proses terjadinya transmigrasi mengatakan, bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah mengenai pemerataan penduduk melalui program transmigrasi merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi angka kepadatan penduduk yang berada di pulau Jawa. Saat dilakukannya program transmigrasi memang sudah ada perjanjian sebelumnya yang dipastikan oleh pemerintah, bahwa setiap kepala keluarga sudah disiapkan sarana dan prasarana di lokasi tujuan. Sarana dan prasarana tersebut berupa rumah per Kepala Keluarga (KK), tanah dengan luas 50 x 50 meter, sawah 1 hektar, dan bahan pokok berupa beras. Namun, janji yang dibuat oleh pemerintah ini tidak sesuai dengan apa yang mereka terangkan, hal ini bertolak belakang dengan janji pemerintah sebelumnya, dimana nyatanya ketika para transmigran dari Jawa sampai ke lokasi masih berupa hutan belantara dan rumah yang diberikan juga tidak sesuai dengan

harapan yang diinginkan, rumah dalam perkiraan masyarakat berupa pondok yang beratapkan daun rumbia dan dinding berupa papan biasa, sementara itu lahan yang diberi juga masih harus dibersihkan karena pada dasarnya tempat itu memang masih hutan.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, diketahui bahwa beberapa kesenjangan yang terjadi pada masyarakat transmigrasi di Paguyaman, salah satu yang menjadi temuan peneliti yakni program yang dijadikan alasan untuk upaya pemerataan penduduk dengan perjanjian yang sudah disepakati baik adanya sarana prasarana dan terbukannya lapangan pekerjaan merupakan salah satu strategi pemerintah agar masyarakat mau untuk ikut dalam program transmigrasi, namun beberapa persepsi yang timbul justru menyudutkan para transmigran pada saat sampai di wilayah yang menjadi objek tempat bagi para transmigran.

### **Adaptasi masyarakat Transmigrasi Jawa dengan warga lokal Paguyaman**

Proses adaptasi yang dialami masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal dapat dikatakan baik dan lancar. Proses adaptasi yang dilakukan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam masyarakat, sehingga masyarakat pendatang mampu berbaur langsung dengan masyarakat lokal. *Pertama*, yang menjadi alasan masyarakat pendatang cepat berbaur dengan penduduk asli yakni kesamaan identitas agama (Islam) sehingga memungkinkan terjadinya interaksi di setiap hari-hari besar keagamaan; *Kedua*, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, seperti balai pengobatan serta pasar adalah faktor yang bisa dikatakan memengaruhi proses adaptasi masyarakat transmigran, sebab pada faktor ini memungkinkan terjadinya interaksi yang semakin intens antar masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal Paguyaman; *Ketiga*, tidak adanya konflik agraria seperti yang pernah terjadi di wilayah-wilayah lain; dan *Keempat*, penyelamatan warga pendatang oleh pasukan rimba pimpinan Nani Wartabone dari percobaan pembantaian oleh permesta semakin menjadi penghubung antara penduduk lokal (Gorontalo) dengan pendatang (Jawa dan Sunda), (Manay, 2016).

Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni mengemukakan teori Piaget bahwa proses penyesuaian atau adaptasi merupakan suatu bentuk proses yang mengaitkan dua kegiatan, yaitu mengkombinasikan atau menggabungkan pengetahuan yang diterima oleh manusia, dan merubah struktur pengetahuan yang ada menjadi struktur pengetahuan baru, maka dari itu akan menjadi sebuah keseimbangan. Pada pelaksanaan adaptasi, Piaget mengajukan 4 dasar yaitu, skema, asimilasi, akomodasi dan keseimbangan. Struktur psikologis akan meruntut pada skema seorang dimana manusia akan selalu berusaha dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, ini terjadi karena manusia memiliki kecenderungan untuk mengatur pikiran dan perilakunya. Hal ini mengakibatkan struktur mental perilaku dan aktivitas berpikir manusia yang berbeda pada setiap tahap atau tingkat perkembangan. Oleh karena itu, pikiran harus memiliki struktur skema yang dapat disesuaikan secara intelektual dengan lingkungan. Menurut Piaget, skema orang dewasa berkembang dari skema anak-anak melalui proses penataan dan pengorganisasian adaptif. Semakin seseorang dapat membedakan satu stimulus dari yang lain, semakin banyak skemata yang dimilikinya. Skema dengan demikian terus berkembang dan mengubah struktur kognitif. Proses yang menyebabkan perubahan tersebut adalah asimilasi dan adaptasi. (Hendrowati, 2015).

Syahril Asi juga menegaskan masyarakat lokal Paguyaman dapat saling hidup bersama, dan saling menerima serta baik itu antara masyarakat pendatang maupun masyarakat lokal yang ada di Paguyaman. Selama berada di daerah Paguyaman masyarakat lokal juga merasa nyaman juga tentram kehidupan dalam lingkungan yang saling bertoleransi baik itu dari segi budaya bahasa dan tradisi, buktinya di Paguyaman masyarakat lokal dapat berbahasa Jawa dengan lancar dan begitupun sebaliknya, jadi berbicara adaptasi masyarakat transmigran Jawa yang ada di Paguyaman cukup saling hidup berdampingan dan sejahtera.

### **KESIMPULAN**

Masyarakat transmigrasi Jawa di Paguyaman merupakan masyarakat yang dipindahkan dari pulau Jawa karena adanya kebijakan pemerintah sebagai upaya pemerataan penduduk melalui program transmigrasi dimasa Orde Baru, kebijakan transmigrasi merupakan salah satu solusi untuk menghindari kepadatan penduduk yang ada di Pulau Jawa, ke wilayah yang belum padat penduduknya seperti Pulau Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi yang menjadi tempat para transmigrasi di pindahkan. Provinsi Gorontalo Kabupaten Boalemo, Kecamatan Paguyaman sendiri merupakan



wilayah yang dijadikan tempat bagi para transmigrasi dari pulau Jawa. Ada beberapa Motif para transmigran mau dipindahkan yaitu bahwa pertama motif kemakmuran (mendapatkan lahan seluar 2 hektar, rumah transmigran tipe 36, jaminan hidup baik beras maupun non-beras dan bantuan-bantuan gratis lainnya yang akan dikasih oleh pemerintah; kedua motif kemandirian (memperoleh modal usaha, kesempatan kerja, ekonomi, pembinaan dalam bidang pertanian dan budaya di lokasi transmigrasi); ketiga motif kenyamanan (mendapatkan kehidupan yang lebih ketika pindah melalui program transmigrasi); dan keempat motif afiliasi (mempererat persaudaraan dan tali silaturahmi antar masyarakat transmigran pendatang serta menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan melalui transmigrasi. Meskipun motif yang disampaikan tersebut banyak menuai protes dari masyarakat transmigran ketika tiba di lokasi yang menjadi tempat mereka di pindahkan karena ketidak sesuaian janji pemerintah dengan apa yang mereka sampaikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Riki., Hardoyo, Su Rito., Giyarsih, Sri Rum. (2016). Persepsi dan Motivasi Masyarakat Lokal Terhadap Program Transmigrasi Pasca Konflik di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh”, *Jurnal Kawistara*, 7(2), 188-197.
- Ayu, Monica Diah Ajeng Sekar. (2021). Dominasi Transmigran Ponorogo di Kelurahan Ponorogo (Kajian Penyebab dan Pengaruhnya), *Jurnal El Tarikh*: 2(2), 132-143.
- Bantulu, L. (2019). Identifikasi Potensi Lahan Pertanian di Desa Balate Kecamatan Paguyaman Sebagai Destinasi Berbasis Agrowisata”, *Jurnal Aksara*, 5(3), 179-186.
- Bumulo, S., Adiwibowo, S., Sjaf, S. (2017). Dinamika Penguasaan Lahan dalam Masyarakat Multietnik. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(3), 218-225. <https://doi.org/10.22500/sodality.v5i3.19395>.
- Dahlan H. (2014). Perpindahan Penduduk dalam Tiga Masa: Kolonisasi, Kokuminggakari, dan Transmigrasi di Provinsi Lampung (1905-1979), *Jurnal Patanjala*, 6(3), 335-348.
- Fadhallah, R.A, 2021. “Wawancara”, Jakarta Timur: UNJ Press.
- Habi, Rafika Arifin S., Alam, Hedy Vanni., Asi, Lisda L. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Partisipatif Terhadap Perilaku Kerja Pegawai Pada Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, *Jurnal JAMBURA*, 5(2), 498-503.
- Hafid, A. (2016). Hubungan Sosial Masyarakat Multietnik di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan, *Jurnal Al-Qalam*, 22(1), 156-268.
- Hendrowati, Tri Yuni. (2015). Pembentukan Pengetahuan Lingkaran Melalui Pembelajaran Asimilasi dan Akomodasi Teori Konstruktivisme Piaget, *Jurnal e-DuMath*, 1(1), 1-16.
- J, Ilna Sari Wulandara., Hadara, A., Hak, P. (2022) Masyarakat Transmigran di Desa Arongo Kecamatan Landonno Kabupaten Konawe Selatan (2010-2020), *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah Uho (Jpps-Uho)*, 7(3), 132-142.
- Legiani, Wika Hardika., Lestari, Ria Yunita., Haryono, H. (2018). Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia (Studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan dan Pembangunan), *Jurnal Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*, 4(1), 25-38.
- Manay H. 2016. Proyek Demografi dalam Bayang-Bayang Disintegrasi Nasional, Studi Tentang Transmigrasi di Gorontalo, 1950-1960, *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 1(2), 93-106.
- Nurrani, L., Tabba, S. (2013). Persepsi dan Tingkat Ketergantungan Masyarakat Terhadap Sumberdaya Alam Taman Nasional Aketajawe Lolobata di Provinsi Maluku Utara, *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 10(1), 61-73.
- Pitoyo, A, J., Triwahyudi, H. (2017). Dinamika Perkembangan Etnis di Indonesia Dalam Konteks Persatuan Negara, *Jurnal Populasi*, 25(1), 64-81.
- Prihatin, Rohani Budi. (2013). Revitalisasi Program Transmigrasi, *Jurnal Aspirasi*, 4(1), 57-64.

- Putra, P. (2019). Strategi dan Bentuk-bentuk Informasi Transmigrasi pada Masa Orde Baru dalam Rangka Mensukseskan Program Pembangunan Nasional, *Jurnal Kepustakawanan dan Masyarakat Membaca*, 35(2), 1-15.
- Resnawaty, R., Fedryansyah, M. (2017). Kondisi Sosial Masyarakat di Sekitar Perusahaan di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, *Jurnal Penelitian & PPM*, 4(2), 129 – 389.
- Santoso, Kurniawan Budi., Nasir, H, Badruddin., (2022). Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Transmigrasi di Desa Sumber Sari Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur, *eJournal Pemerintahan Integratif*, 9(4), 2022, 265-275.
- Soemardjan, S. (1998). *“Migrasi, kolonisasi, perubahan sosial”*, Malang: Pustaka Grafika Kita.
- Sudarmo, W. (2007). *“Mencari Indonesia: Demografi Politik pasca Soeharto”*, Jakarta : LIPI Press.
- Suparmi., Yasin, Nirwan II. (2020). Kehidupan Awal Masyarakat Transmigran di Desa Sungai Tenang Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat 1973-1980, *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 14(1), 91-104.
- Undang-undang No. 15 Tahun 1997, tentang ketransmigrasian. 09 Mei 1997. LN. 1997/ No. 37, TLN NO. 3682. Jakarta.
- Yudohusodo, S. (1998). *“Transmigrasi kebutuhan kepulauan berpenduduk heterogen dengan persebaran yang timpang”*, Jakarta: PT Jurnal Indo Aksara Grafika.
- Yuminarti, U. (2017). Kebijakan Transmigrasi dalam Kerangka Otonomi Khusus di Papua: Masalah dan Harapan, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 12(1), 13-24.